

# DOKUMENTASI KEGIATAN

## 2025/08/07/A3 Menambahkan konteks dalam narasi video OSL Penegakan Hukum Pidana di Sektor Pertambangan

2. **SEGMENT 2: Memahami Penegakan HukPid Pertambangan (0:45-2:15)**

NARASI

Menurut Prof. Soerjono Soekanto dari Universitas Indonesia, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kenyataan.

Lalu menurut Barda Nawawi Arief dari Universitas Diponegoro, Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, serta bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penerapan sanksi pidana yang adil dan proporsional.


Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum pidana adalah proses aplikatif dari hukum pidana substantif melalui hukum acara pidana, yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Secara garis besar, pendapat para ahli tersebut menyampaikan bahwa penegakan hukum pidana merupakan proses untuk menegakkan norma atau nilai yang terkandung di masyarakat yang diakomodasikan ke dalam hukum materiil.

Jika pengertian tadi kita gunakan dalam konteks sektor pertambangan, maka Penegakan hukum pidana di sektor pertambangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang mengatur tata kelola pertambangan secara adil, tertib, dan berkelanjutan

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kenyataan. Dalam konteks pidana, ini mencakup segala upaya aparat penegak hukum untuk menanggapi pelanggaran hukum pidana secara tegas dan terukur

5

	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN	No. Dok. : Ed/Rev : Tgl : Halaman : 6
	PELATIHAN HUKUM PERTAMBANGAN LANJUTAN	

(Soekanto, 2010).

b. **Barda Nawawi Arief (Ahli Hukum Universitas Diponegoro)**  
Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, serta bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penerapan sanksi pidana yang adil dan proporsional. (Arief, 2002).

c. **Jimly Asshiddiqie (Ahli Hukum Universitas Indonesia)**  
Penegakan hukum pidana adalah proses aplikatif dari hukum pidana substantif melalui hukum acara pidana, yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. (Asshiddiqie, 2007).

Beberapa pendapat ahli tersebut secara garis **besar** menyampaikan bahwa penegakan hukum pidana merupakan proses untuk menegakkan norma atau nilai yang terkandung di masyarakat yang diakomodir dalam hukum materiil. Proses ini

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. (Asshiddiqie, 2007).

Beberapa pendapat ahli tersebut secara garis **besar** menyampaikan bahwa penegakan hukum pidana merupakan proses untuk menegakkan norma atau nilai yang terkandung di masyarakat yang diakomodir dalam hukum materiil. Proses ini berupaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dalam bertindak laku dan menjalin hubungan antar sesama. Proses penegakan hukum pidana juga berarti penanggulangan kejahatan yang dilakukan seseorang yang merusak ketertiban tersebut. Proses penanggulangan kejahatan tersebut diikuti dengan pemberian sanksi sebagai efek jera agar masyarakat tidak mengulangi kejahatan tersebut kembali.

**B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana di Sektor Pertambangan**

Penegakan hukum pidana di sektor pertambangan adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang mengatur tata kelola pertambangan secara adil, tertib, dan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana dalam konteks ini mencakup upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta penghormatan atas hak masyarakat. Penegakan hukum pidana dapat bersifat represif dan preventif, represif yaitu melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran seperti penambangan ilegal, pencemaran lingkungan, dan korupsi perizinan. Sedangkan penegakan hukum bersifat preventif yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pembinaan, pengawasan, dan penguatan regulasi yang konsisten.

6

Page 3 of 11 36 of 1516 words 111%


AutoSave HPL 01-02 Sistem Penegakan Hukpid - Saving...

Home Insert Draw Design Layout Comments Editing Share

Paste Font Paragraph Styles Dictate Add-ins Editor

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Pengantar Materi OSL HPL 3/11

	Modul	1. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN
	Topik	01-02 Sistem Penegakan Hukum Pidana
	Tanggal	04 Agustus 2025   Revisi: 09 Agustus 2025
	Durasi	Maksimal 7 Menit 0 Detik

Penegakkan hukum ini memiliki dua sisi: preventif dan represif. Sisi preventif mencegah kejahatan melalui pengawasan dan pembinaan. Sementara sisi represif memberikan sanksi tegas kepada pelanggar.

Page 3 of 11 1516 words 111%

Page 9 of 33 6598 words 135%

AutoSave Modul 1 Penegakan Hukum d... - Last Modified: 2 July

Home Insert Draw Design Layout Comments Editing Share

Paste Font Paragraph Styles Dictate Add-ins Editor

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Page 10 of 33 6598 words 135%